CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DP3APPKB

Alamat : Komplek Pemda II, Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul 55714,

Tlp. 0274-6460055 ; Fax. 0274-6460055

Email : dp3appkb@bantulkab.go.id

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Penyusunan Laporan Keuangan dimaksudkan :

1. Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
2. Sebagai Bahan Laporan dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2022.
3. Sebagai tolok ukur pelaksanaan APBD Tahun 2022.

Adapun tujuan Penyusunan Laporan Keuangan :

1. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi serta hasil – hasil yang telah dicapai.
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul mendanai seluruh kegiatan.
4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:
10. DPA-SKPD, Nomor : DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2022, Tanggal 5 Januari 2022;
11. DPPA-SKPD, Nomor : DPPA/B.1/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2022, Tanggal 25 Oktober 2022.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Bab I Pendahuluan
Bab II Ekonomi Makro
Bab III Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Bantul yang mempunyai tujuan :

1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera
2. Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mewujudkan kemandirian dan partisipasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Untuk mewujudkannya, dalam pelaksanaan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul diarahkan pada tujuan tersebut diatas.

2.2. Kebijakan Keuangan

Masyarakat, maka dukungan dana APBD Kabupaten Bantul Sebagai Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan umum dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk keberhasilan tugas pokok dan fungsi tersebut.

APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 21.053.997.649,00 .

APBD tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terdiri dari :

- Belanja operasi : Rp. 19.460.442.413,00
- Belanja modal : Rp. 1.593.555.236,00

dan dialokasikan untuk membiayai:

No.	Program Kegiatan	Anggaran
1.	Pelembagan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	10.625.000
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	16.575.000
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	232.537.500
4.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	150.450.000
5.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	497.681.800
6.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.525.000
7.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.850.000
8.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	127.050.000
9.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	356.783.745
10.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	767.661.975
11.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.306.000
12.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	87.100.548

	Perangkat Daerah	
13.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.943.788.478
14.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.677.444
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.941.048
16.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.548.027
17.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	19.307.500
18.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	316.327.450
19.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.047.192.384
20.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	897.038.000
21.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.482.785.750
22.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	917.275.000
23.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.552.097.500
24.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	14.222.500
25.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	502.650.000
	Jumlah Pagu Anggaran	21.053.997.649

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Indikator pencapaian target kinerja pada APBD tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	62%	62%	100%
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing- masing perangkat daerah	25	25	100%
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dunia usaha yang berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak	5 Dunia Usaha	5 Dunia Usaha	100%
		Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	3 Lembaga	3 Lembaga	100%
		Program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	5 Program	5 Program	100%
2.08.02.	**Pemberdayaan**	Partisipasi	50%	50%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
2.02	**Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Perempuan di organisasi masyarakat			
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Koordinasi evaluasi APE	1 Kali	1 Kali	100%
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Capaian pendampingan organisasi wanita	30%	30%	100%
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasiilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	25 Organisasi	25 Organisasi	100%
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Persatuan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa yang tersosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	3 Desa	3 Desa	100%
2.08.03	**PROGRAM**	Rasio kekerasan	0,00035	0,00059	169%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	terhadap perempuan			
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	40 Lembaga	40 Lembaga	100%
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang	50 Orang	50 Orang	100%
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	7 Lembaga	7 Lembaga	100%
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	59 Orang	141%
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	6 Layanan	100%
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan**	Capaian instansi dan organisasi	60 Lembaga	60 Lembaga	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO			
2.08.03. 2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan perempuan	52 Lembaga	52 Lembaga	100%
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7 Persen	7 Persen	100%
2.08.05. 2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Update Data Pilah gender	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.08.05. 2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Buku data pilah gender	50 Buku	50 Buku	100%
		Instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data	45 Lembaga	45 Lembaga	100%
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Cakupan desa layak anak	15 Kaluraha n	75 Kaluraha n	500%
2.08.06. 2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	10 Persen	65,60 Persen	656%
2.08.06. 2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Dunia usaha yang tergabung dalam forum perlindungan	5 Pengusaha	5 Pengusaha	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	anak			
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi	1 Forum	1 Forum	100%
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak	17 Kapanewon	17 Kapanewon	100%
		Terlaksananya workshop penyusunan profil anak	1 Kali	1 Kali	100%
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga yang berperan dalam perlindungnan anak	52 Lembaga	84 Lembaga	162%
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	100 Persen	100%
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang**	Capaian perlindungan	100 Persen	100 Persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	khusus korban kekerasan anak			
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	213 Orang	142%
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	6 Layanan	100%
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Instansi/lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan anak	23 Lembaga	23 Lembaga	100%
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan**	Lembaga Penyedia	1 Lembaga	1 Lembaga	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Bagi Anak			
2.08.07.2.03.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlatihnya SDM forum perlindungan anak dalam manajemen kasus kekerasan	50 Orang	50 Orang	100%
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	83	100%
2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84 Persen	100 Persen	119%
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		DPPA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	85 Persen	100 Persen	118%
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 Kali	14 Kali	100%
2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	85 Persen	100 Persen	118%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Harddisk Eksternal	1 Unit	1 Unit	100%
		Komputer	2 Unit	2 Unit	100%
		Laptop	1 Unit	1 Unit	100%
		Meja Kursi Tamu	1 Set	1 Set	100%
		Printer	1 Unit	1 Unit	100%
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 Jenis	14 Jenis	100%
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	4 Unit	4 Unit	100%
		Penggandaan	5000 Lembar	5000 Lembar	100%
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	2 Jenis	2 Jenis	100%
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	30 Dokumen	30 Dokumen	100%
		Penyediaan Makan Minum Tamu	630 Orang	630 Orang	100%
		Perjalanan Ke Dalam Daerah	11 Kali	11 Kali	100%
		Perjalanan Ke Luar Daerah	4 Kali	4 Kali	100%
2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100%
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda pos dan Materai	480 Buah	480 Buah	100%
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Alat Listrik	3 Jenis	3 Jenis	100%
2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	50 Jenis	50 Jenis	100%
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	192 Orang	192 Orang	100%
		Laporan Keamanan dan Ketertiban	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Lingkungan Kantor			
		Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Perawatan Kendaraan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas	5000 Dokumen	10498 Dokumen	210%
2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100%
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan bakar minyak	9000 Liter	8910 Liter	99%
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	50 Unit	48 Unit	96%
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	16 Unit	15 Unit	94%
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	8 Unit	8 Unit	100%
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	83 Unit	79 Unit	95%
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	6 Jenis	100%
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor	19 Unit	19 Unit	100%
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	1,66	1,65	100%
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan**	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Laporan Capaian Program Bangga Kencana / KKBPK	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	100 Persen	100 Persen	100%
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Buku Laporan Bangga Kencana/KKBPK tingkat dusun	1000 Buku	1000 Buku	100%
		Cetak F/1/Dal/Dus	1000 Buku	1000 Buku	100%
		Cetak Media Leaflet	1025 Buah	1025 Buah	100%
		Kader Pengolah Data	965 Orang	965 Orang	100%
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cetak Form R1 Pendataan Keluarga	5911 Lembar	5911 Lembar	100%
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Biaya Sewa Langganan Internet Balai Operasional KB	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Dukungan Managemen BOKB	6 Jenis	6 Jenis	100%
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Data Aplikasi Simduk KKBPK	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Petugas Operator Data Tingkat Desa	75 Orang	75 Orang	100%
		Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun	1010 Orang	1010 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,20 Persen	73,50 Persen	95,21%
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan KIE	80 Persen	80 Persen	100%
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Bangga Kencana	40 Orang	40 Orang	100%
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Spanduk (DAK Non Fisik)	20 Unit	20 Unit	100%
		Standing Banner (DAK Non Fisik)	10 Unit	10 Unit	100%
		Umbul-Umbul (DAK Non Fisik)	48 Unit	48 Unit	100%
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Penggunaan Media Elektronik dan Iklan Layanan Masyarakat dalam Program KB	2 Jenis	2 Jenis	100%
		Peningkatan Pemahaman Peserta KIE	5000 Orang	5000 Orang	100%
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pemahaman Peserta Forum Kampung KB Terhadap Tupoksi	150 Orang	150 Orang	100%
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Alat Tulis Kantor (DAK Non Fisik)	6 Jenis	6 Jenis	100%
		Laporan Kegiatan Operasional	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Orientasi Tenaga Lini Lapangan (DAK Non Fisik)			
		Laporan Kegiatan Operasional Pembinaan Kader (DAK Non Fisik)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Laporan Pengolahan Data (DAK Non Fisik)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Pembayaran Rekening Internet (DAK Non Fisik)	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pembayaran Rekening Listrik (DAK Non Fisik)	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penggandaan (DAK Non Fisik)	21134 Lembar	21000 Lembar	99%
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Focus Group Discussion (FGD) Kampung KB	75 Orang	75 Orang	100%
		KIE Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	12 Jenis Kegiatan	12 Jenis Kegiatan	100%
		Audit Kasus Stunting	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Promosi dan KIE Program KB	17 Kapanewon	17 Kapanewon	100%
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	100 Persen	100 Persen	100%
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kader KKPKBD, PPKBD dan Sub PPKBD 7015 orang	7015 Orang	7015 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan Kegiatan Forum IMP Kabupaten 408 orang	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Kegiatan IMP Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan Peserta 240 orang	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Kegiatan Pendampingan Forum Genre Kabupaten 55 orang	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Bimtek PPKB IMP	50 Orang	50 Orang	100%
		Jambore IMP	100 Orang	100 Orang	100%
		Peringatan Hari Keluarga	750 Orang	750 Orang	100%
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	90 Persen	90 Persen	100%
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
		Ketersediaan Obat-Obatan Pendukung Pelayanan KB	4 Jenis	4 Jenis	100%
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Operasional Pelayanan KB MOP (Metode Operasi Pria)	15 Akseptor	13 Akseptor	87%
		Operasional Pencabutan Implan (DAK Non Fisik)	55 Akseptor	55 Akseptor	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Operasional Penggerakan Pelayanan KB - MOW (Metode Operasi Wanita) DAK Non Fisik	176 Akseptor	162 Akseptor	92%
		Operasional Penggerakan Pelayanan KB Implan (DAK Non Fisik)	950 Akseptor	767 Akseptor	81%
		Operasional Penggerakan Pelayanan KB IUD (DAK Non Fisik)	3870 Akseptor	1341 Akseptor	35%
		Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOP (Metode Operasi Pria) DAK Non Fisik	18 Akseptor	18 Akseptor	100%
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Mobil Alat Jemput Akseptor KB	1 Unit	1 Unit	100%
		Sepeda Motor Bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB	31 Unit	31 Unit	100%
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	78 Faskes	78 Faskes	100%
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di	Advokasi dan KIE KRR bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	90 Orang	90 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Pemahaman Remaja tentang Kesehatan Reproduksi	450 Orang	450 Orang	100%
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Laporan Lomba IMP dengan Peserta 17 Orang	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Laporan Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun dengan Peserta 17 Orang	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Laporan Lomba PLKB Peserta 17 Orang	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Lomba Festival Kampung KB	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Operasional Pelayanan KB MOP (Metode Operasi Pria)	20 Orang	4 Orang	20%
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	80 Persen	80 Persen	100%
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Gelar Produk UPPKS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Gelar Tribina	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyuluhan Narkoba	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyuluhan Triat KRR	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Puncak Monev Yandu KB Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Laporan Pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	83 Persen	83 Persen	100%
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	100 Persen	100 Persen	100%
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	BKB Kit Stunting (DAK FISIK)	35 Unit	35 Unit	100%
		Kit Siap Nikah Anti Stunting (DAK FISIK)	21 Unit	21 Unit	100%
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelatihan Asuhan Dini Tumbuh kembang Anak Adituka	90 Orang	90 Orang	100%
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan Bimtek kelompok Tribina	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Laporan Pelaksanaan Lomba PIK R	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pelaksanaan Lomba Tribina	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Lomba UPPKS			
		Evaluasi Kegiatan Tribina dan UPPKS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		KIT Siap Nikah Anti Stunting	10 Unit	10 Unit	100%
		Orientasi PIK R	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pemahaman peserta Orientasi Kelompok UPPKS	60 Orang	60 Orang	100%
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembiayaan Paket Data Anggota Tim Pendamping Keluarga - Pulsa Survailance Stunting	1218 Orang	1218 Orang	100%
		Pendampingan Calon Pengantin	7409 Orang	5697 Orang	77%
		Pendampingan Ibu Hamil	16072 Orang	12113 Orang	75%
		Pendampingan Ibu Melahirkan	16072 Orang	15578 Orang	97%
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	100 Persen	100 Persen	100%
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Capaian desa prima	37,33 Persen	37,33 Persen	100%
2.22.08. 2.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	rekomendasi dan pendampingan desa prima	11 Desa	11 Desa	100%
2.22.08. 2.09.02	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Pelatihan dan pengembangan desa Prima	11 Desa	11 Desa	100%
		Workshop desa prima	120 Orang	120 Orang	100%

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar **88,76%.** Adapun kegiatan meliputi :

No.	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1.	Pelembagan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	10.625.000	10.625.000	0	100
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	16.575.000	16.575.000	0	100
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	232.537.500	230.077.500	2.460.000	99
4.	Pencegahan	150.450.000	146.950.000	3.500.000	98

	Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
5.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	497.681.800	472.185.408	25.496.392	95
6.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.525.000	22.525.000	0	100
7.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.850.000	7.850.000	0	100
8.	Pelembagaan PHA pada Lembaga	127.050.000	124.550.000	2.500.000	98

	Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
9.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	356.783.745	352.947.325	3.836.420	99
10.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	767.661.975	717.255.081	50.406.894	93
11.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.306.000	102.306.000	0	100
12.	Perencanaan,	87.100.548	86.071.044	1.029.504	99

	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
13.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.943.788.478	4.117.322.774	826.465.704	83
14.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.677.444	283.764.660	20.912.784	93
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.941.048	276.777.338	7.163.710	97
16.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.548.027	368.881.068	24.666.959	94
17.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	19.307.500	19.307.500	0	100
18.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	316.327.450	283.343.850	32.983.600	90

	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
19.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.047.192.384	2.004.438.774	42.753.610	98
20.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	897.038.000	888.755.500	8.282.500	99
21.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.482.785.750	2.729.557.650	753.228.100	78
22.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan	917.275.000	917.275.000	0	100

	Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
23.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.552.097.500	4.016.432.500	535.665.000	88
24.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	14.222.500	14.222.500	0	100
25.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	502.650.000	477.885.000	24.765.000	95
	Jumlah Pagu Anggaran	21.053.997.649	18.687.731.472	2.366.266.177	88,76

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

Secara umum, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan telah dapat direalisasikan, adapun sisa merupakan efisiensi dan sisa pengadaan.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian yang ditetapkan adalah :

1. OPD P3APPKB adalah OPD baru dari dinas sebelumnya PPKBPMD dan dari Dinas Sosial P3A sehingga untuk merealisasikan harus merubah renstra dan juga beberapa perubahan di DPA P3APPKB 2022. Perubahan anggaran juga disesuaikan kebutuhan Dinas P3APPKB yang merupakan pecahan dari Dinas sebelumnya.
2. Juknis dari BKKBN yang direvisi pada triwulan 2 membuat pelaksanaan mundur sehingga penyerapan anggaran dari Bidang Dalduk KB tidak maximal terutama pada Honor TPKK, Pulsa Kader , ayoman dan MKJP MOP
3. Untuk dana DAK dari P3A pada kegiatan UPTD koordinasi dan sinkronisasi pendampingan yang memerlukan perlindungan khusus belum terserap maximal. Diantaranya adalah Biaya Mediko Legal sudah tercover Bapel Jamkesos , Belum ada permintaan layanan rumah aman (kurang 1 shelter korban kekerasan, Belum ada permintaan pemeriksaan DNA dr kepolisian dan Sudah dicover bapel Jamkesos
4.
5.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul sudah berusaha untuk menerapkan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten, sebagai berikut :

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

a. Kas dan setara kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten terdiri dari :

- Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara Umum daerah, terdiri dari atas saldo rekening di Kas Daerah setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.

  Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten yang berada di rekening Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Setara kas, antara lain berupa desposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

- Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggungjawab /dikelola oleh Bendahara Pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas penerimaan Bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang pertanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan . Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :

- Biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri ;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

c. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

- Investasi Nonpermanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang , penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

- Investasi Permanen

Investasi permanent adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara bekelanjutan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat social . Investasi permanent dinilai dan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi permanen terdiri atas :

- Penyertaan modal/ekuitas dalam BUMN/BUMD, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik Negara ;
- Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan Negara, Pemerintah Daerah otonom dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang diterus pinjamkan ;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga ;
- Investasi permanen lainnyayang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan

Penyertaan modal pemerintah daerah menggambarkan jumlah yang umum. Aset dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah di dalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan yang kepemilikan 51 % atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.

Pinjaman kepada BUMN/BUMD menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal kurang dari 51% sahan ekuitas dari setiap badan usaha tersebut dan dicatat sebagai pinjaman.

Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu

d. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah, atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

- Klarifikasi aset tetap yang digunakan adalah :
- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan jaringan
- Aset tetap lainnya

- Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

e. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar , investasi jangka panjang , aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

1. Aset tak berwujud
2. Tagihan penjualan angsuran
3. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Lain-lain aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

f. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklarifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

g. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga

- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Utang Jangka Pendek Lainnya

h. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

i. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek .

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

j. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

4.4 *Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan*

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penelian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukan penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan penjelasan realisasi masing-masing pos pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan : nihil
- Aset Tetap : Rp. 8.783.428.415,43
- Belanja Operasi
  - Belanja Pegawai : Rp. 4.265.432.774
  - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 12.838.393.798
  - Belanja Hibah : Rp. 0
- Belanja Modal
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 1.547.011.900
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 36.893.000

Adapun Neraca Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NERACA SKPD

PER : 31 DESEMBER 2022

No	Uraian	Jumlah
1	**ASET**	
11	**ASET LANCAR**	
111	**Kas dan Setara Kas**	**0,00**
11101	Kas di Kas Daerah	0,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
11104	Kas di BLUD	0,00
11105	Kas di Bendahara BOS	0,00
11107	Kas di Pengelola Dana Bergulir	0,00
11108	Kas di Bendahara Blockgrant	0,00
11109	Kas di KPU dan Panwas	0,00
113	**Piutang**	**0,00**
11301	Piutang Pajak	0,00
1130101	Piutang Pajak (Bruto)	0,00
1130102	Penyisihan Piutang Pajak	0,00
11302	Piutang Retribusi	0,00
1130201	Piutang Retribusi (Bruto)	0,00
1130202	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00
11304	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00
1130401	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Bruto)	0,00
1130402	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00
114	**Belanja Dibayar Dimuka**	**0,00**
11401	Belanja Dibayar Dimuka	0,00
11501	Piutang Lainnya	250.505.247,00
1150101	Piutang Lainnya (Bruto)	4.605.420.981,00
1150102	Penyisihan Piutang Lainnya	(4.354.915.734,00)
11601	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00
11701	Piutang Lain-lain	0,00
119	**Persediaan**	**145.865.305,00**
11901	Persediaan	145.865.305,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**396.370.552,00**
13	**ASET TETAP**	
131	**Tanah**	**16.125.000,00**
13101	Tanah	16.125.000,00
132	**Peralatan dan Mesin**	**10.074.458.690,51**
13201	Peralatan dan Mesin	10.074.458.690,51
133	**Gedung dan Bangunan**	**7.428.698.634,00**
13301	Gedung dan Bangunan	7.428.698.634,00

No	Uraian	Jumlah
134	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**113.678.478,00**
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.678.478,00
135	**Aset Tetap Lainnya**	**242.857,00**
13501	Aset Tetap Lainnya	242.857,00
136	**Konstruksi dalam Pengerjaan**	**0,00**
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
137	**Akumulasi Penyusutan**	**(8.849.775.244,08)**
13701	Akumulasi Penyusutan	(8.849.775.244,08)
	JUMLAH ASET TETAP	**8.783.428.415,43**
15	**ASET LAINNYA**	
15101	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00
15201	Tagihan Jangka Panjang	0,00
153	**Aset Tak Berwujud**	**0,00**
15301	Aset Tak Berwujud	64.550.000,00
15306	Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud	(64.550.000,00)
154	**Aset Lain-lain**	**0,00**
15401	Aset Lain-lain	0,00
155	**Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya**	**0,00**
15501	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	**0,00**
	JUMLAH ASET	**9.179.798.967,43**
2	**KEWAJIBAN**	
21	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00
21201	Utang Bunga	0,00
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00
215	**Utang Belanja**	**650.104,00**
21501	Utang Belanja	650.104,00
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
21602	Utang Uang Jaminan	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**650.104,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**650.104,00**
3	**EKUITAS**	
31	**EKUITAS**	
311	**Ekuitas**	**9.179.148.863,43**
	JUMLAH EKUITAS	**9.179.148.863,43**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**9.179.798.967,43**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2022 jumlah pegawai sebagai berikut :

1. ASN : 37 orang
2. Non ASN : 39 orang
3. ASN Fungsional : 39 orang (30 pegawai PLKB dan 9 pegawai DP3APPKB)

Penghargaan yang diraih DP3APPKB di tahun 2022

- Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan Penghargaan kategori Nindya pada tahun 2022 setelah sebelumnya mendapatkan kategori Madya
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mendapatkan predikat informatif
- Piagam Penghargaan Terbaik II atas pelaksanaan Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting terintegrasi
- Predikat terbaik ke II Tingkat Nasional dalam acara apresiasi Tenaga Lini lapangan yang digelar BKKBN yaitu Ibu Sri Rahayu, S.Pd
- Piagam Penghargaan "Perempuan berjasa dan berprestasi Bidang Lingkungan Hidup"
- Penghargaan Anugerah Anak Jogja Kategori Layanan Terpadu Anak Korban Kekerasan Terbaik Tingkat Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 2022

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD PADA TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2021		2022	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
PREVALENSI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK	0,47	0,04	0,45	0,032
NILAI KLA	620	619,77	730	715
NILAI RATA RATA JUMLAH ANAK DALAM KELUARGA	2,54	1,67	2,5	2,05

- Untuk Indikator Kinerja Prevalensi Kekerasan Perempuan dan Anak untuk target tahun 2021 dan 2022 terealisasi 0.04 dan 0.032 dalam artian bahwa indicator negative tidak tercapai dan realisasi jauh dibawah
- Untuk Nilai KLA pada tahun 2021 dan 2022 belum tercapai semua, akan tetapi predikat Nindya pada tahun 2022 tercapai
- Untuk IKU Nilai Rata rata Jumlah anak dalam keluarga juga tidak tercapai dalam artian ini juga indicator negative. semakin jauh realisasinya semakin baik

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan.

Bantul, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Dra. Ninik Istitarini, Apt, MPH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196603201996032002